# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

## **Sejarah Kab Barru**

Kabupaten barru adalah salah satu dari 23 kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Sulawesi selatan. letaknya pada pesisir barat jazirah selatan pulau Sulawesi, sekitar 100 km pada bagian utara kota makassar ibukota provinsi Sulawesi selatan. posisi wilayah kabupaten barru ini, memanjang dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai 78 km, sehingga 5 dari 7 Kecamatan yang ada di kabupaten barru ini memiliki wilayah pantai.

Kabupaten barru yang dikenal dengan Otto hibrida (hijau bersih Indah) adalah salah satu kabupaten yang terletak dipesisir pantai barat propinsi Sulawesi selatan dengan garis pantai sekitar 78km. Secara geografis terletak Siantar koordinat 4’0.5’35’ bujur timur dengan luas wilayah 1.174.72 Km2 9117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102Km sebelah tara kota Makassar ibu kota provinsi Sulawesi selatan, yang dapat di tempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam.

luas wilayah kabupaten barru **1.174.72 km2 atau 117.472 ha.**  di pandang dari segi topografi daerah ini memilkii dataran rendah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut dan memiliki wilayah pegunungan yang berada pada ketinggian 1.000 s.d. 1.500 meter dari permukaan laut dengan proporsi kemiringan 0 – 2 % hingga kemiringan 44 %. letak wilayahnya berbatasan dengan :

1. sebelah utara berbatasan dengan kota parepare dan kabupaten sidrap
2. sebelah timur berbatasan dengan kabupaten soppeng dan kabupaten bone
3. sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten pangkajene dan kepulauan
4. sebelah barat berbatasan dengan selat makassar.

secara administrasi pemerintahan, wilayah kabupaten barru terdiri dari 7 Kecamatan, yang meliputi 14 kelurahan dan 40 desa, yang dapat kami sebutkan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mallusetasi, dengan pusat pemerintahan di Palanro
2. Kecamatan Soppeng Riaja, dengan pusat pemerintahan di Mangkoso
3. Kecamatan Balusu, dengan pusat pemerintahan di Takkalasi
4. Kecamatan Barru, dengan pusat pemerintahan di Sumpang binangae **( Ibukota Kabupaten )**
5. Kecamatan Tanete Rilau, dengan pusat pemerintahan di Pekkae Tanete
6. Kecamatan Tanete Riaja, dengan pusat pemerintahan di Ralla, dan
7. Kecamatan Pujananting, dengan pusat pemerintahan di Pattappa.

jumlah penduduk kabupaten barru, sebanyak **165.900 jiwa** yang terdiri dari laki-laki sebanyak **79.616 jiwa** dan perempuan sebanyak **86.284 jiwa.**

dipandang dari segi kesejarahan, jauh sebelum terbentuknya kabupaten barru, di daerah ini berkembang beberapa kerajaan yang merdeka dan berdaulat. kerajaan – kerajaan tersebut adalah :

1. Kerajaan Tanete
2. Kerajaan Soppeng Riaja
3. Kerajaan Barru
4. Kerajaan Palanro, dan
5. Kerajaan Nepo

Di masa pemerintahan Belanda dibentuk pemerintahan sipil Belanda Diana wilayah kerajaan barru, tante dan Soppeng raja dimasukkan odalan wilayah Wonder afdelling barru yang bernaung di bawah afdelling Parepare sebagai kepala pemerintahan binder afdelling diangkat seorang Control Belanda yang berkedudukan di barru, sedangkan ke tiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai sel besture (pemerintahan kerajaan sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun yudikatif.

Dilihat dari sejarah, sebelum menjadi daerah-daerah swapraja pada permulaan kemerdekaan bangsa Indonesia, keempat wilayah swapraja ini merupakan 4 bekas selfbesture di dalam afdelling Parepare masing-masing:

1. Bekas selfbesture Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi Kecamatan Mallusetasi dengan ibukota Palanro. Adalah penggabungan bekas kerajaan lili di bawah kekuasaan kerajaan ajatappareng oleh Belanda sebagai selfbestuur, ialah kerajaan lili bon dan kerajaan lili Eko
2. Bekas selfbestuur Soppeng raja yang merupakan penggabungan 4 kerajaan Soppeng (sekarang kabupaten Soppeng) sebagai selfbestuur ialah bekas kerajaan lili Siddo, lili Kiru-Kiru, lili Ajakkang dan lili Balusu.
3. Bekas selfbestuur Barru yang sekarang menjadi Kecamatan barru dengan ibu kotanya sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan sebuah kerajaan kecil yang berdiri sendiri.
4. Bekas selfbestuur tante dengan pusat pemerintahannya di pancana daerah sekarang menjadi 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan tante Riau, Kecamatan tante raja, Kecamatan Pujananting.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 24 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran kabupaten daerah tingkat II barru dengan ibukota barru berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi selatan. Kabupaten barru terdiri dari 7 Kecamatan dan 54 desa/kelurahan.

dengan undang-undang nomor 29 tahun 1959 (tambahan lembaran negara nomor 1822 tahun 1959); tentang pembentukan daerah tingkat II dalam propinsi Sulawesi selatan dan menetapkan wilayah swapraja Tanete, Barru, Soppeng Riaja dan Mallusetasi menjadi satu daerah Tingkat II dengan sebutan daerah Tingkat II barru. penambahan wilayah Mallusetasi ini berkaitan dengan wilayah pemerintahan ini berbatasan dengan swapraja barru dan penetapan kota Parepare menjadi satu kota praja (kemudian disebut kota madya dan sekarang dengan pemerintahan kota) yang wilayahnya meliputi soreang dan bacukiki yang penerimaan itu menjadi dasar keutuhan daerah tingkat dua barru.

berdasarkan undang – undang ini ditetapkan pusat pemerintahan administrasi di sumpang binangae dan jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) sebanyak 18 orang. penetapan kepala pemeritahan didasarkan pada surat keputusan menteri dalam negeri nomor u.p.7/2/39-372 tertanggal 28 Januari 1960 yang menetapkan kapten Infanteri Lanakka (Nrp: 16309) menjadi kepala daerah tingkat ii barru periode 1960 – 1965. upacara pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1960. dalam seminar yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1993 di barru menetapkan tanggal 20 Februari 1960 menjadi hari jadi kabupaten barru.

sejak tanggal tersebut, kabupaten barru telah beberapa kali melaksanakan pergantian bupati, adapun nama – nama bupati kabupaten barru secara berturut – turut adalah sebagai berikut :

bupati :

1. Lanakka 20 – 02 – 1960 s.d 01 – 02 – 1965
2. H. Machmud Sewang 16 – 07 – 1965 s.d 05 – 03 – 1980
3. H. Andi Syukur 05 – 03 – 1980 s.d 05 – 03 – 1985
4. H. A. Mansyur Sultan,BA 05 – 03 – 1985 s.d 05 – 03 – 1990
5. Drs. H. A. Pamadengrukka 05 – 03 – 1990 s.d 05 – 03 – 1995

Mappanyompa

1. Drs. H. A. Makkasau Razak 06 – 04 – 1995 s.d 07 – 04 – 2000
2. Drs. H. Syamsul Alam Bulu, M.Si 07 – 04 – 2000 s.d 03– 05 – 2000

( Penjabat Bupati)

1. Drs. H. A. muhammad rum 04 – 05 – 2000 s.d 04 – 05 – 2005
2. Drs. H. M. Arsyad Kale,M.Si

( Penjabat Bupati) 04 – 05 – 2005 s.d 10 – 08 – 2005

1. Drs. H. A. Muhammad Rum 10 – 08 – 2005 s.d 10 – 08 – 2010
2. Drs. H. A. Idris syukur, M.Si 10 – 08 – 2010 sampai saat ini.

## **Visi dan Misi**

**VISI**

“dengan semangat kebersamaan yang bernafaskan keagamaan, kita wujudkan kabupaten barru yang maju, sejahtera dan bermartabat yang bernafaskan keagamaan”

* semangat kebersamaan bermakna bahwa upaya membangun kabupaten barru perlu dilakukan dengan menggalang semangat kebersamaan dan melibatkan seluruh masyarakat barru termasuk yang bermukim di luar kabupaten barru.

Kebersamaan mengandung makna interkonektivitas dan mengajak semua pihak untuk bersinergi mewujudkan cita-cita pembangunan.

* Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa pembangunan di kabupaten barru dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai luhur agama, khususnya agama islam.
* Maju, sejahtera bermakna bahwa pembangunan kabupaten barru dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat kabupaten barru yang lebih maju dan sejahtera dengan meningkatkan akses informasi, pemanfaatan teknologi maju, serta turut dalam pergaulan nasional dan internasional. Bermartabat berarti segala langkah yang dilakukan harus berpegang pada nilai-nilai luhur dan budaya masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang madani.

**Visi Aparat Pemerintahan**

* Aparat, yang mencapai ridho Allah, berarti bahwa semua aparat dan masyarakat selalu berorientasi untuk mewujudkan ridho Allah dengan melakukan pekerjaan sehungga produktivitas SDM semakin baik dan penyalahgunaan wewenang, perselisihan, dan penekanan terhadap golongan yang lemah tidak terjadi lagi. Semuanya saling mendukung, saling membantu dan saling menguntungkan.
* Aparat pemerintahan melakukan yang terbaik, berarti bahwa aparat mencapai keberhasilan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap pekerjaan atau amanah yang di embannya dan prinsip yang dapat di pegang adalah melakukan yang terbaik pada setiap pekerjaan, dan bekerja hari ini, hidup di tentukan oleh hari ini sehingga dengan prinsip tersebut semua akan melakukan tugas dan tanggung jawab yang terak untuk hari ini, dan melakukan pengabdian yang terbaik hari ini. dengan demikian, aparat pemerintahan berusaha memberikakn pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan masyarakat yang merasa terlayani akan mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Komitmen yang bulat dari seluruh masyarakat barru menjadi sumber semangat untuk bangkit menjadi masyarakat maju, sejahtera dan bermartabat, berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme dan memanfaatkan sumber daya menjadi optimal.

Kedua visi aparat tersebut, baik mencari ridho maupun melakukan yang terbaik dapat menyatu dalam pepatah Bugis resopa temmangingi namalomo naletei pammase dewata yang artinya bekerja terus menerus tanpa pamrih akan mendapat ridho Allah.

**MISI**

Berdasarkan visi tersebut di atas maka dirumuskan misi sebagai berikut :

* Meningkatkan pengamalan Pancasila dan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
* Menciptakan lingkungan yang kondusif (aman, tertib, dan nyaman) yang mendorong investasi dan peningkatan pendayagunaan sumber daya pembangunan.
* Menciptakan interkonektivitas dengan wilayah lain kemitraan yang sinergis/saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan dunia usaha dengan prinsip kesetaraan sebagai perwujudan demokrasi ekonomi
* Meningkatkan peran aparatur sebagai pelayan kepentingan masyarakat, motivator, dinamisator dan aktivator untuk membangitkan semangat dan peran serta masyarakat sebagai aktor pembangunan.

# Profil Key Informan dan Informan

Dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informan penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan informasi, mengetahui dan terlibat langsung pada Pelaksanaan e-PUPNS di Kabupaten Barru. sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Informan tersebut berjumlah 8 (Delapan) orang, yaitu:

Tabel 2 : Daftar Nama Key Informan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jabatan** | **Umur** | **Pendidikan** |
| Ir. H. Nasruddin Yake | Kepala BKD | 50 Tahun | S1 |
| Suparman, S.Sos | Kabid Data &  Informasi BKD | 48 Tahun | S1 |
| Hj. Fitriani, S.Sos | Kasubid Informasi pegawai BKD | 39 Tahun | S1 |

Tabel 3 : Daftar Nama Informan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jabatan** | **Umur** | **Pendidikan** |
| Andi Makmun, SE, M.Si | Assisten 1 Bidang  administrasi Umum | 54 tahun | S2 |
| Sopan Mulaputra, S.Ap, M.Ap | Bagian Organisasi  (verifikator) | 35 Tahun | S2 |
| Hj. Nurdiah | Bagian Organisasi | 51 tahun | S1 |
| Akbar Mangenre Kurusi, S.Ip | Bagian Humas  & Protokol | 37 Tahun | S1 |
| Andi Roswati, SH. M,Ap | Bagian Hukum | 35 Tahun | S1 |
| H. Ahmad | Bagian Kesra | 43 Tahun | S1 |
| Abdul Malik | Bagian Umum | 46 Tahun | SMU |
| Hj. Hardiah | Bagian  Pem, Umum | 55 Tahun | SMU |
| Fitriana | Bagian Sandi | 38 Tahun | D3 |
| Ledi Diliyana, S.Kom | Bagian Pertanahan | 35 Tahun | S1 |

# Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini akan diuraikan di bawah ini.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, maka dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul *“Dampak Sosialisasi Pelaksanaan e-PUPNS Tahun 2015 Terhadap Tingkat Penguasaan ICT (Information Communication Technologi) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barru”* berdasarkan empat aspek : Sosialisasi, Pengetahuan, Sikap dan perilaku

## **Sosialisasi**

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara elektronik disingkat **e**-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Ruang lingkup pengguna Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik atau dikenal dengan e- PUPNS  adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah khususnya unit /satuan kerja yang bertugas melakukan pelayanan kepegawaian.
3. Badan Kepegawaian Negara, Pusat dan Kantor Regional.

Sistem pendataan yang telah diterapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam melaksanakan e-PUPNS dibangun dengan teknologi berbasis Internet, saat ini untuk pengguna dapat mengakses dengan menggunakan web browser melalui alamat <http://pupns.bkn.go.id>.

Terkait dengan pelaksanaan, info resmi tindak lanjut PUPNS 2015 pada tanggal 5 Januari 2016 telah disampaikan melalui surat edaran resmi dari BKN terkait tindak lanjut e-PUPNS Nomor K.26-30/V-2/99 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS.

Dalam surat edaran tentang tindak lanjut e-PUPNS tersebut pada intinya menyebutkan bahwa registrasi e-PUPNS telah ditutup per 31 Desember 2015, namun berdasarkan hasil evaluasi BKN yang dikarenakan masih ada PNS yang belum melakukan pendaftaran e-PUPNS maka diberi waktu perpanjangan bagi yang belum berhasil daftar e-PUPNS.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan kepala BKD kabupaten barru Nasruddin Yake Mengenai kapan pendataan e-PUPNS dilaksanakan di kabupaten Barru, beliau mengatakan:

“e-PUPNSnya sosialisasi Agustus 2015, kemudian mulai proses itu Oktober, masing-masing PNS sudah melakukan registrasi karena waktu itukan dikasi batasan sampai tanggal 31 Desember 2015 (wawancara 6 Mei 2016)

Hal yang senada juga disampaikan oleh kepala bidang yang membidangi Data dan Informasi di BKD Kabupaten Barru Bapak Suparman beliau mengatakan

“Jadi kita mengacu pada aturan kepala BKN, jadi itu efektifnya 1 September 2015 sekalipun tahapan-tahapannya memang ada dibilang persiapan diawali dengan namanya sosialisasi, jadi sosialisasinya itu ya semua SKPD, sebelum masuk ke 1 Februari jadi ada persiapan itu di bulan Agustus” jadi semua persiapannya sudah selesai baru kita buka secara resmi di barru 1 September 2015 itu jam pukul 12.00

Sesuai dengan pernyataan di atas maka, diketahui bahwa di kabupaten barru sendiri, Pelaksanaan e-PUPNS dimulai dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2015,

Keterangan dari pengguna e-PUPNS dalam hal ini PNS yang ada di sekretariat daerah kab. Barru bervariasi namun kebanyakan menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BKD sudah efektif sesuai dari pernyataan Siti Nurdalia (wawancara tanggal) yang mengatakan

“Efektif ji karena kayaknya orang sudah semuami menginput toh, kayaknya positif itu karena orang sudah mendaftar e-PUPNS kecuali memang yang malas tidak na perhatikan”

Hal serupa juga di ungkapkan oleh asisten 3 bidang administrasi umum Andi Makmun (wawancara tanggal)

“Ya saya rasa sudah efektif karena sejalan dengan aturan yang lebih tinggi pelaksanaannya.

Begitu juga dengan informan Akbar Mangenre Kurusi (Wawancara tanggal) mengatakan

“Kalau informasinya, hampir semua tahu! saya rasa efektif, karena sudah sampai ke semua, tingkat untuk mengukur efektif tidaknya ketika informasi itu sampai ke pegawai berarti itu efektif, Yang saya tau dia (BKD) pertama dia menginformasikan, mensosialisasikan, terus admin-admin di SKPD memang dilatih, ada pelatihan teknis”

Berdasarkan keterangan informan-informan tersebut, diketahui bahwa mereka menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BKD kabupaten barru dalam memperkenalkan e-PUPNS itu sudah efektif walaupun sumber informasi tentang e-PUPNS didapat dari bermacam-macam sumber, seperti yang di ungkapkan oleh informan Sopan Mulaputra (wawancara tanggal) mengatakan

“Yang pertama sebenarnya dari media komunikasi sebelum keluar suratnya,dan kemudian pelatihan”

Ditambahkan bahwa oleh Abdul Malik (wawancara tanggal) bahwa

Saya tahu, seperti menyebarluaskan spanduk kemudian secara tersurat ke seluruh SKPD,

Kalau masalah pelatihan yang dilakukan BKD, Saya tahu persis ada satu orang yang mewakili untuk pelatihan sistem pengisian data e-PUPNS

Hal senada pula di ungkapkan oleh Ledy Diliyana (wawancara tanggal

“iya ada sosialisasi yang dilakukan oleh BKD, seingat saya awalnya surat pemberitahuan tentang e-PUPNS ini, terus ada lagi surat permintaan orang untuk dilatih, tapi untuk sekretariat orangnya ji organisasi yang diminta, kita di sini tidak untuk”

Hal di atas kemudian di pertegas pula oleh BKD kabupaten barru dalam hal ini kepala sup bidang Informasi Kepegawaian Fitriani (Wawancara tanggal) mengatakan

“Biasanya kita sosialisasi ada bentuk persuratan, bentuk spanduk/pamflet dipasang memang toh, terus melalui internet sendiri (Media sosial), aktif di situ. Jadi jika mereka tidak memahami bisa bertanya langsung”

Hal berbeda di ungkap informan yang tidak mengetahui tentang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BKD mengenai e-PUPNS seperti yang di ungkapkan oleh ibu Fitriani yang mengatakan

“Masalah sosialisasi sama BKD Tidak pernah, kan pas hari itu saya ke Bogor, namun lewat teman di tanya bilang begini Begini (tentang e-PUPNS)”

Begitu juga dengan Ahmad (wawancara tanggal)

“Saya dapat itu dari buka internet ,kalau sosialisasi BKD sendiri? kayaknya tidak pernah.”

Bedasarkan informasi yang di dapat mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh BKD kabupaten barru, tentunya hal tersebut memberikan dampak terhadap pegawai negeri sipil yang menjadi sasana sosialisasi e-PUPNS ini. dampak adanya sosiali tersebut di jelaskan oleh para informan sebagai berikut, salah satunya dijelaskan oleh abad. Malik (wawancara tanggal)

“Iya pasti sangat besar dampaknya karena dari ketidaktahuan kami tentang aplikasi seperti itu karena adanya PUPNS sehingga saya harus belajar dan harus memahami”

Di tempat lain saudara Ahmad juga memberikan alasannya yang mengatakan:

“Saya kira ini adalah bagian dari teknologi, artinya dalam melakukan penginputan data e-PUPNS ini kita diajar artinya seperti tadi saya katakan bagian dari teknologi. jadi saya kira itu merupakan pembelajaran kepada kita untuk paham teknologi dan lebih meningkat. selama ini mungkin kita kita tidak kenal namanya penginputan ataukah aplikasi-aplikasi seperti itu tapi dengan adanya kita lebih tahu lagi bahwa seperti inilah. Artinya nanti kala ada aplikasi lain kan sudah tahu bahwa seperti ini, ada gambaran”

Pendapat lain juga diutarakan oleh Ledy diliana (wawancara tanggal)

“Iya jelas ada dampaknya, kan bisa di tau bahwa e-PUPNS seperti ini, tujuannya, fungsinya juga ditahu. Terutama bagaimana mengisi data kan kita bisa tanyakan juga langsung”

Hal serupa paparkan oleh Akbar Mangenre yang mengatakan

“Ya setelah saya mendapat infonya saya sangat memahami, sangat paham mulai dari pendaftaran data registrasinya, mulai dari level satu, level dua, level tiga,mengisi formnya, bagaikan itu dinaikkan itu dari level satu ke level dua, ke level tiga”

Fitriani juga mengatakan bahwa (wawancara tanggal)

“Banyak, memacu untuk tahu lebih jauh”

Namun hal berbeda juga di utarakan oleh Sopan Mulaputra sebagai verifikator pada sekretariat daerah kap. barru :

“Kalau terkait sosialisasi e-PUPNS sebenarnya kurang terlalu berpengaruh dengan pengetahuan yang kami dapatkan karena begitu kemarin sosialisasinya kurang tepatlah”

Begitu juga yang dikatakan oleh Hardiah (wawancara tanggal)

“Tidakji, tidak ada pengaruhnya itu sosialisasinya BKD”

Sesuai dengan keterangan para informan di atas, maka pendapat mereka mengenai bagaimana dampak sosialisasi e-PUPNS yang dilakukan oleh BKD kabupaten Barru dapat di kategorikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Dampak sosialisasi e-PUPNS terhadap PNS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Informan** | **Dampak sosialisasi e-PUPNS**  **oleh BKD Barru** | |
| **Berdampak** | **Tidak Berdampak** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | Andi Makmun  Sopan Mulaputra  Nurliah  Akbar Mangenre Kurusi  Andi Roswati  Ahmad  Abdul Malik  Hardiah  Fitriana  Ledy Diliyana | **√**  **-**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **-**  **√**  **√** | **-**  **√**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **√**  **-**  **-** |

Mengingat pentingnya tujuan e-PUPNS untuk memperbaiki Data Base Nasional PNS, maka Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan e-PUPNS dan memerintahkan seluruh PNS untuk melaksanakan e-PUPNS sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan e-PUPNS tahun 2015.

Terkait masalah sosialisasi Kepala BKD Bapak Nasruddin Yake menambahkan :

“Jadi sosialisasi kan itu memang sudah terpolakan, jadi dari pusat, kemudian ke BKN regional, kemudian mengundang kita untuk sosialisasi mengenai PUPNS itu, di sini kita tindak lanjutnya itu mengundang semua SKPD, jadi masing-masing SKPD ada wakilnya yang hadir karena itu kita persyaratkan kemudian kita lakukan sosialisasinya, apa ya kalau boleh dikatakan secara informal, dilakukan di kantor BKD menghadirkan semua utusan SKPD, kemudian pada sosialisasi itu terutama kita tekankan bagaimana melakukan registrasi, cara pendaftaran registrasi sampai dengan selesai” (wawancara 6 Mei 2016 Pukul 10:30)

Pada dasarnya Tujuan e-PUPNS adalah Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.

Terkait masalah tujuan diadakannya e- PUPNS ini Kepala Bidang Data dan Informasi BKD Kabupaten Barru bapak Suparman mengatakan

“kita mau melihat salah satunya adalah pegawai negeri sipil yang aktif dan tidak aktif, jadi kita bisa melihat pegawai negeri sipil secara nasional yang ada di kabupaten kota, akurasi data, lengkap dan terpercaya, jadi situ nanti dilihat pegawai negeri sipil yang tidak aktif contohnya yang tidak mengikuti e-PUPNS dia tidak aktif” (wawancara 3 April 2015)

Ditambahkan juga keterangan dari Fitriani mengatakan

“Sebenarnya untuk kemudahan pelayanan ke depan, sekarang semua orang transparan dalam Hal data dan informasi, untuk kemudahan akurasi, dan melihat apakah, kan banyak data-data yang tidak sinkron sendiri kabupaten dengan BKN, karena memang tahun-tahun sebelumnya sudah meninggal atau sebenarnya untuk validasi data BKN.”

Dari keterangan yang didapatkan dari beberapa informan di atas maka keterangan mereka tersebut sejalan dengan tujuan sebenarnya sesuai dengan Perka yang di keluarkan oleh BKN No. 19 Tahun 2015 yang isinya menjelaskan bahwa Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

## **Pengetahuan**

Organisasi yang Menggunakan sebuah teknologi informasi dalam kegiatannya organisasinya maka otomatis dibutuhkan pula kemampuan sumber daya yang kompeten pula, tentunya hal ini didasari oleh pengetahuan mengenai teknologi, tuntutan era globalisasi saat ini memaksa organisasi pemerintah maupun swasta untuk menjadikan teknologi informasi sebagai solusi terbaik namun harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang baik pula, pengetahuan tentang Teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam hal pengoperasian sebuah teknologi baru, begitu juga dengan e-PUPNS ini. pegawai negeri sipil sebagai sasaran dan pengguna Teknologi informasi dan komunikasi harus mempunyai kemampuan pengetahuan tentang teknologi berbasis internet,

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, diketahui bahwa Sekretariat daerah kabupaten barru sebagai instansi induk di kabupaten barru, tentu sumber daya manusia yang dimiliki memiliki kompetensi dan kemampuan yang bermacam-macam pula, ini didasarkan beberapa faktor antara lain Pendidikan, Umur dan pengalaman. Ketiga hal tersebut tidak begitu mempengaruhi kemampuan pegawai negeri sipil dalam menggunakan Teknologi informasi dan komunikasi. Karena dari wawancara yang penulis lakukan pegawai negeri sipil rata-rata mengerjakan sendiri penginputan e-PUPNS mereka, dengan alasan yang bermacam Seperti yang di jelaskan oleh Andi Roswati yang mengatakan:

“Tempo hari untuk e-PUPNS saya, saya isi sendiri sesuai dengan informasi yang saya dapat dan Kalau ada penambahan data kan meminta user untuk meningkatkn status”

Hal serupa diungkapkan oleh abd. Malik (wawancara tanggal) yang mengatakan

“Karena dituntut untuk belajar mengisi data secara online sehingga apa yang ada dalam program PUPNS itu ingin kita ketahui sehingga kita mencoba untuk memahami aplikasi PUPNS itu dan belajar memang untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dari PUPNS itu”

Begitu juga dengan Ledy Diliyana (wawancara Tanggal)

“Saya tahu, paham karena saya kerja sendiri punyaku, intruksinyakan harus kerja sendiri supaya tidak ada kesalahan. kebanyakan sih dikerjakan orang karena di sini susah jaringan toh”

Informan nurlia juga mengatakan (wawancara tanggal)

“Input sendiri, daftar sendiri. saya itu lebih suka kerja sendiri toh supaya saya tau kak dulukan orang bilang saya tidak mau belajar komputer karena nanti saya terus di suruh. Saya tidak begitu. Karena saya sendiri yang rasakan nanti.

Kalau saya tahu cepatki kukerja daripada suruh orang lain, berat juga, lebih baik saya. Bisa tommka buka data”

Hal senada juga di utarakan oleh fitriani (wawancara Tanggal).

“Iya, alasannya siapa mau kerjakanka, karena kan biodatata sendiri, saya kerja sendiri, kecuali saya tidak tahu saya bertanya lagi”

Sedangkan hal berbeda diungkapkan oleh informan Hardiah (wawancara Tanggal) yang tidak mampu mengaplikasikan program tersebut mengatakan

“Saya Cuma paham isinya, tapi tidak bisa mengaplikasikan, tidak tahu fungsinya”

Begitu juga dengan Andi Makmun mengatakan.

“Kalo Secara pribadi, paham maksudnya tapi untuk pelaksanaaan aplikasinya kami terus terang kalau semacam kami level eselon II kan pengambil kebijakan, kami tidak tau persis, sedikit banyaknya tau sih tahu maksud dan tujuannya”

Hal yang sama juga di ungkap Ahmad, yang mengatakan

“saya kira kita kan hanya tahu tujuannya kemudian maksudnya dan pengertiannya, kalau masalah kita anu (penginputan) seperti saya kan saya tidak, orang lain yang inputkan jadi hanya sebatas itu yang hanya saya ketahui,

Alasannya,

Sebenarnya tau tapi karena Alasan kesibukan sehingga membuat kami meminta tolong kepada orang lain untuk membantu mendelegasikan karena kesibukan tugas tugas dikantor yang mungkin istilahnya memungkinkan waktu kita yang secara anu kemudian yang membuat juga kita itu karena dari segi jaringan karena mungkin kita sudah mau bikin tapi karena jaringan, sementara ada tugas tugas lain yang memburu kita untuk diselesaikan sehingga lebih baik kita serahkan kerang lain yang memang secara fokus dia melaksanakan itu, melakukan pengolahan data PNS, tidak lagi kita terbebani dengan misalnya kita yang lakukan Iain sementara kita mau bikin, gangguan lagi jaringan terus kita tentukan istilahnya kalor seperti itu terhalang lagi untuk menginput jadi lebih baik kita kerja tugas tugas sehari hari tugas pokok kita jadi kita tidak terbebani terpikirkan lagi bahwa saya belum kerja dan lain sebagainya.”

Dari keterangan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pegawai negeri sipil yang ada di sekretariat daerah kabupaten barru yang menggunakan e-PUPNS memasukkan sendiri data mereka ke dalam aplikasi e-PUPNS namun ada juga beberapa yang memilih untuk menyuruh orang lain menginputkan data-data mereka dengan alasan alasan tertentu. Dari keterangan yang didapat dalam penelitian bahwa rata-rata pengetahuan pegawai negeri sipil di sekretariat daerah kabupaten barru tentang teknologi informasi dan komunikasi bukan menjadi kendala berarti bagi mereka.

Tabel 3: Pengetahuan PNS mengenai e-PUPNS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Informan** | **Pengetahuan Mengenai e-PUPNS** | | | | | |
| **Tahu** | **Memahami** | **Mengaplikasikan** | **Analisis** | **Sintesis** | **evaluasi** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | Andi Makmun  Sopan Mulaputra  Nurliah  Akbar Mangenre,M  Andi Roswati  Ahmad  Abdul Malik  Hardiah  Fitriana  Ledy Diliyana | **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√** | **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√** | **-**  **√**  **√**  **√**  **√**  **-**  **√**  **-**  **√**  **√** | **-**  **√**  **√**  **√**  **√**  **-**  **√**  **-**  **√**  **√** | **-**  **√**  **√**  **√**  **√**  **-**  **√**  **-**  **√**  **√** | **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√** |

## **Sikap & Perilaku**

e-PUPNS adalah sebuah inovasi baru yang dikeluarkan oleh BKN untuk menjawab tantangan di era modernisasi seperti sekarang ini, Teknologi informasi kemudian dijadikan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sudah banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi mereka. Hal inilah kemudian yang di pahami BKN sebagai organisasi yang mengelola data-data kepegawaian di seluruh Indonesia. Perubahan dari penggunaan sistem konvensional menjadi sistem elektronik adalah pilihan yang dianggap akan memudahkan organisasi BKN mengelola sekian banyak data kepegawaian di seluruh Indonesia.

Tentunya pengenalan melalui sosialisasi oleh BKD Kab. Barru tentu tidak bisa diterima langsung oleh pegawai negeri sipil yang menjadi sasaran penerapan inovasi baru ini. perlu sebuah proses untuk merubah sikap & perilaku Pegawai negeri sipil bagaimana mereka melihat program e-PUPNS ini.

Namun Dari data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung bahwa PNS di kabupaten barru yang menjadi sasaran program e\_PUPNS ini memperlihatkan sikap dan perilaku yang positif, ini dilihat dari sikap dan perilaku mereka yang berusaha mencari informasi yang detail mengenai program ini, seperti keterangan-keterangan informan di atas yang rata-rata mengatakan mereka mencari informasi mengenai e-PUPNS di internet, rata-rata semua informal menyambut positif adanya program baru ini perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik seperti dijelaskan oleh:

“saya setuju perubahan ini, tapi ada juga itu orang yang tidak punya anu (kemampuan),bagaimana yang tidak punya, di desa juga kan biasa tidak ada jaringan, secara pribadi setujuji dengan perubahan ini, kan ada peningkatan kalau begini kalau manual terus kan tidak ada peningkatan.

Hal senada diungkapkan oleh Akbar Mangenre Kurusi (Wawancara Tanggal)

“Sangat setuju, justru sangat setuju, saya sangat sependapat, bagus sekali, tinggal bagaimana konsisten toh, bagus, kalau saya sangat Bagus, karena kita bisa mengikuti kita punya data diri kita sejauh mana”

diungkapkan juga oleh Andi Roswati (wawancara tanggal) yang mengatakan bahwa

Iya bagus, menghemat waktu dan data kita sudah lengkap di situ, karena itu program pusat otomatis harus setuju”

Pendapat yang sama diutarakan oleh Ledy Diliyana, (wawancara Tanggal)

Iya secara pribadi saya sangat setuju dengan aplikasi e-PUPNS ini, karena lebih mudah, lebih lengkap, dan tidak menyulitkan. Saya kira sangat bagus

Dari pernyataan pernyataan di atas maka sangat sesuai dengan dengan apa yang dikatakan oleh kepala BKD kabupaten barru bapak Nasruddin Yake bahwa

“jadi teknologi informasi itu kebutuhan mendasar untuk era kemajuan bangsa terutama di birokrasi, tidak perlu lagi kita menggunakan pakai persuratan-persuratan, tinggal masukkan, orang baca, butuh fisiknya, buka, tinggal sprint. Saya harapkan juga itu layanan kepegawaian juga itu di BKD, tidak usah kirim surat ke mana mana,bukan sesuatu yang sulit untuk dipelajari”

Lanjut beliau menjelaskan

“Yang sering terjadi kesalahan itu dalam pengisian formatnya, yang tidak ada dalam format contoh misalnya ada penerimaan jabatan tapi di pilihannya tidak ada dalam format, jadi lebih pada pemilihan formatnya bukan pada teknologi informasinya. pilihan yang ada di situ itu yang terbatas. sama mungkin tempat lahir kan di situ tidak ada nama desa nama kelurahan, yang ada hanya nama kabupaten di situ mungkin hanya tertulis desa, itu yang banyak kemarin. Jadi keterbatasan pada sistemnya bukan pada teknologinya.”

Dari keterangan para informan di atas dapat diketahui bahwa sikap pegawai negeri sipil di sekretariat daerah kab. Barru terhadap e-PUPNS di kategorikan dalam tabel berikut :

Tabel 4 : Sikap PNS terhadap e-PUPNS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Informan** | **Sikap PNS terhadapa e-PUPNS** | |
| **Menerima** | **Tidak menerima** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | Andi Makmun  Sopan Mulaputra  Nurliah  Akbar Mangenre Kurusi  Andi Roswati  Ahmad  Abdul Malik  Hardiah  Fitriana  Ledy Diliyana | **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√** | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** |

# Analisis dan Pembahasan

Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online dan dilaksanakan sejak bulan Juli dan berakhir pada Desember 2015 yang lalu oleh BKD dari tingkat Pusat, Regional dan kabupaten/kota. Untuk proses pemutakhiran data ini setiap PNS memulai dengan melakukan pemeriksaan data yang tersedia dalam database kepegawaian BKN dan selanjutnya PNS, melakukan perbaikan data yang tidak sesuai serta menambahkan/melengkapi data yang belum lengkap/tersedia di database BKN.

Tujuan dari PUPNS adalah Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. membangun kepedulian dan kepemilikan PNS terhadap data kepegawaiannya.

Program e-PUPNS merupakan program baru yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2015 dibangun dengan teknologi berbasis internet menggantikan pendataan secara manual. Dengan tujuan meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. dalam melaksanakan e-PUPNS tentunya perlu langkah-langkah jitu untuk memperkenalkan aplikasi baru ini kepada pengguna dalam hal ini pegawai negeri sipil di kabupaten barru, agar memberikan dampak positif bagi penggunanya.

Berdasarkan penelitian selama kurang lebih tiga bulan, penulis berhasil mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara mendalam mengenai *Dampak Sosialisasi Pelaksanaan e-PUPNS Tahun 2015 Terhadap Tingkat Penguasaan ICT (Information Communication Technologi) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barru*. Dari data tersebut, penulis akhirnya mendiskripsikannya dalam hasil penelitian dan selanjutnya akan dibahas di bawah ini.

## **Dampak sosialisasi pelaksanaan e-PUPNS oleh BKD Kabupaten Barru**

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa sosialisasi dapat diartikan sebagai proses mempelajari dan menanamkan suatu nilai, norma, peran, dan pola perilaku dari satu generasi ke generasi lain dalam sebuah kelompok atau masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari data penelitian yang didapat maka dapat di ketahui BKD kabupaten barru yang berwenang melaksanakan program e-PUPNS tahun 2015 menggunakan beberapa metode sosialisasi untuk memperkenalkan program pendataan pegawai yang baru ini. antara lain dengan Sosialisasi yang sifatnya sebagai Informasi, Sosialisasi untuk melatih Kemampuan dan Sosialisasi untuk merubah Sikap

### Sosialisasi sebagai Informasi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya (BAB II) sosialisasi diartikan sebagai proses pengalihan/pentransferan informasi, Dalam hal data, informasi dapat didefenisikan sebagai kumpulan fakta yang daripadanya kita menarik suatu kesimpulan. ada banyak aspek lain tentang informasi karena kehadirannya merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui studi atau pengalaman belajar/instruksional. Secara keseluruhan, informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian data dalam suatu cara demi menambah pengetahuan bagi orang yang menerimanya.

Dalam sosialisasi e-PUPNS yang dilakukan oleh BKD barru dalam menyampaikan informasi, model sosialisasi yang digunakan adalah:

1. Persuratan, model persuratan pada lembaga birokrasi saat ini dianggap sebagai media penyampaian informasi masih sangat efektif. Surat saat ini masih sangat erat hubungannya dengan kantor. Kantor tanpa surat berarti tidak ada aktivitas yang dapat dilakukan. Besar kecilnya kantor dapat dilihat dari banyak sedikitnya surat yang terdapat di kantor tersebut.

2. spanduk/Pamflet, model sosialisasi ini banyak digunakan dalam kegiatan yang sifatnya insidentil , biasa dipakai untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan tertentu seperi hal BKD barru yang memperkenalkan e-PUPNS.

3. Media Sosial, model sosialisasi di media sosial saat ini menjadi media yang paling populer digunakan untuk menginformasikan sebuah pesan, Karena kelebihan untuk menjangkau khalayak luas. Media komunikasi ini juga menjadi salah satu media pilihan yang digunakan Oleh BKD kabupaten barru untuk menginformasikan e-PUPNS.

Dari data yang didapat di atas sesuai dengan teori komunikasi menurut Claude Shannon dan Warren Weaver (1949, Weaver. 1949), pada teori ini disebutkan bahwa komunikasi sebagai transmisi pesan & bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media dalam berkomunikasi, di dalam teori komunikasi informasi ini menitik beratkan pada saluran atau media yang digunakan oleh transmitter jika sinyal dalam media ini tidak baik maka proses komunikasi tersebut akan tidak lancar begitu sebaliknya.

Begitu juga Proses komunikasi yang dijelaskan oleh Charles Osgood Geraldmiller dan Melvin L. De Fleure menambahkan lagi unsur efek dan umpan balik (Feedback) serta Joseph De Vito, K. Sereno dan Erika Vora yang menilai faktor lingkungan juga turut andil dalam proses komunikasi.

Dari hasil penelitian yang didapat, Dari 3 (tiga) model sosialisasi yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Barru dalam memperkenalkan e-PUPNS tentu saja hal tersebut memberikan dampak (efek) dari pesan-pesan yang disampaikan. Efek yang disebarkan melalui media tersebut memberikan perubahan-perubahan pada penerima pesan dalam hal ini PNS yang ada di kabupaten barru yang menjadi audience sebagai akibat dari perubahan psikologis atas informasi yang diterima. Perubahan -perubahan tersebut antara lain:

* 1. *Perubahan Tingkat Pengetahuan/persepetual (Kognitif)*

Efek kognitif berhubungan dengan pikiran dan penalaran, sehingga khalayak yang semula tidak tau, tidak mengerti, yang tadinya merasa bingung merasa jelas.

Menurut Leon festinger dalam teorinya manusia membawa berbagai macam unsur (elemen) kognitif dalam dirinya: elemen sikap, persepsi, pengetahuan, dan elemen tingkah laku (Behavior). Masing-masing elemen itu tidak terpisahkan satu sama lain namun saling memengaruhi dalam suatu sistem yang saling berhubungan. Masing-masing elemen akan memilih salah satu jenis hubungan dari tiga jenis hubungan yang mungkin ada dengan masing-masing elemen lainnya.

Seperti halnya dalam program e-PUPNS yang dilakukan oleh BKD Barru. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada pegawai negeri sipil di lingkup kabupaten barru mengenai e-PUPNS, Bagaimana sebenarnya e-PUPNS, Tujuan e-PUPNS bagaimana mengaplikasikannya.

Hal tersebut sesuai apa yang di definisikan Notoatmojo :2007 yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini adalah setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.

Dalam keseharian kita Pengetahuan dianggap sebagai pembentukan yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru yang didapat dari lingkungan tempat seseorang berada.

Sebagaimana yang terjadi di lingkungan sekretariat daerah kabupaten barru, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang didapat oleh masing - masing PNS berbeda - beda. data - data yang diperoleh menemukan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman pegawai negeri sipil tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor yang berhubungan dengan internal PNS sendiri seperti pendidikan, pengalaman dan usia sedangkan faktor eksternal seperti, sosial budaya dan lingkungan.

Sedangkan dalam hal penerimaan pesan dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh BKD kabupaten barru kebanyakan para informan mengetahui informasi mengenai e-PUPNS ini setelah informasi beredar luas, maka dari informasi itulah muncul keingintahuan pegawai negeri sipil untuk mengetahui lebih jauh tentang aplikasi yang disosialisasikan oleh BKD kabupaten barru. Hal ini tentu menempatkan tingkatan penerimaan pengetahuan atau inovasi baru ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Roger.

Rogers membagi pelapisan penerima pesan atas lima tipe, yakni :

1. Innovator (pembaharu)
2. Early adopter (penerima dini)
3. Early Majority (penerima mayoritas cepat)
4. Late Mayority (penerima mayoritas Lambat)
5. Leggard (pengikut)

Nah dari data yang diperoleh, bahwa PNS di sekretariat daerah kabupaten barru berada pada tingkatan ke 3 (tiga) yaitu Early Majority (penerima mayoritas cepat) dalam hal penerimaan informasi atau inovasi baru, yaitu mereka yang tergolong sebagai penerima pesan-pesan atau ide-ide baru sebelum rata-rata anggota lainnya menerima ide tersebut.

Sedangkan dalam Proses pengenalan program e-PUPNS sendiri melalui beberapa tahapan. dari hasil penelitian yang dilakukan maka tahapan awal dapat diketahui bahwa pegawai negeri sipil di sekretariat daerah kabupaten barru sangat menyambut positif dengan adanya aplikasi berbasis internet ini seperti ini, ini juga dapat dilihat sebagaimana antusiasnya mereka kemudian mencari informasi terkait aplikasi ini, baik melalui internet ataupun bertanya langsung ke BKD yang mengeluarkan aplikasi tersebut. Artinya secara pribadi mereka menganggap hal ini sebagai hal yang positif sehingga mereka mampu membuka diri untuk kemudian menerima.

Pada tahap selanjutnya dengan berbekal pengetahuan yang mereka dapat dari hasil sosialisasi yang diperoleh dari BKD maka kemudian muncul keinginan untuk mengetahui lebih jauh, ingin mencoba atau bagaimana sebenarnya sistem e-PUPNS ini.

Sedangkan pada tahap terakhir, setelah pegawai negeri sipil mendapatkan semua informasi tentang e-PUPNS ini didapatkan dan diketahui maka mereka akan melihat segi efisiensi dan kegunaan aplikasi e-PUPNS ini, diaman mereka melihat aplikasi lebih memberikan keuntungan dan kemudahan maka mereka akhirnya memberikan keputusan untuk menggunakan aplikasi ini dengan melihat manfaat yang di berikan dan konsekuensi yang harus diterimanya.

Hal ini tentu sangat sesuai yang di jelaskan oleh M.Roger yang membagi tingkatan dalam penerimaan informasi atau inovasi baru yaitu

1. Tahapan Awal *(Antecedent)*
2. Proses *(procces)*
3. Konsekuensi *(Consequences)*
   1. Terjadinya perubahan pada tingkat emosional/perasaan (Komponen Afektif)

Di sini efek afektif berkaitan dengan perasaan akibat dari informasi yang diterima oleh audience dalam hal ini pegawai negeri sipil di sekretariat daerah kabupaten barru yang memperoleh informasi tentang sosialisasi yang dilakukan oleh BKD kabupaten barru. Dari data yang diperoleh di ketahui bahwa BKN memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada PNS bersangkutan jika dalam batas waktu penginputan data e-PUPNS yang sudah di tentukan, pegawai negeri sipil belum melakukan menginput data pada program yang telah disediakan. Tentu saja hal ini menimbulkan gejolak atau rasa takut. Sehingga PNS segera melakukan penginputan data mereka.

Pada tingkatan ini sangat berhubungan juga dengan rasa senang atau tidak senang pegawai negeri sipil terhadap aplikasi e-PUPNS yang di keluarkan oleh BKN ini. rasa senang merupakan hal positif jika pegawai negeri sipil menyambut baik program ini, sikap positif ini mempunyai kecenderungan untuk mendekati, menyenangi, mengharapkan informasi yang diterima. sedangkan rasa senang akan timbul akan mengakibatkan munculnya penilaian negatif terhadap program e-PUPNS ini sehingga terdapat kecendrungan untuk menghindari, membenci, tidak menyukai informasi yang diterima.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pegawai negeri sipil yang ada di sekretariat daerah kabupaten barru, menyambut positif dengan adanya e-PUPNS yang berbasis internet ini, perubahan dari pendataan sistem manual ke pendataan secara elektronik dianggap sangat memberikan kemudahan dan efisiensi bagi Pegawai Negeri Sipil.

1. Terjadinya perubahan pada tingkat Perilaku (Komponen Konatif)

Pada tingkat perubahan konatif ini lebih pada kecenderungan bagaimana niat, tekad, upaya, usaha yang cenderung menjadi suatu kegiatan suatu tindakan atau kegiatan. Komponen yang ini berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap, atau respons dari sikap seseorang. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seorang terhadap objek sikap.

Sikap biasanya memberikan penilaian menerima atau menolak terhadap informasi yang di terima. Selanjutnya apabila sikap tidak di tampakkan melalui lisan berarti sikapnya belum mempunyai arti. Pernyataan seseorang sebagai sikapnya secara lisan atau perbuatan, tidaklah sesuai dengan sikap hati yang sesungguhnya. Perwujudan sikap tersebut memang dipengaruhi faktor lingkungan dan situasi di saat seseorang ingin mengekspresikan sikapnya. Lingkungan akan mempengaruhi secara timbal balik perilaku seseorang. Interaksi antara situasi lingkungan di dalam dan di luar individu dengan sikap akan membentuk suatu proses yang kompleks, yang pada akhirnya menentukan bentuk perilaku yang akan di tampakkan oleh seseorang.

Hasil penelitian menunjukkan pegawai negeri sipil di sekretariat daerah kabupaten barru menunjukkan kecenderungan memberikan sikap positif mengenai e-PUPNS yang sosialisasikan oleh BKD barru, ini dapat dilihat, bagaimana respons mereka untuk mencari informasi, mempelajari, dsb. Sesuai dengan cara-cara tertentu mereka.

Ini juga berdasarkan teori yang digunakan menurut notoadmojo ,1996. Tingkatan sikap PNS dapat di ukur sebagai berikut:

1. Menerima (Receiving)

Dalam tingkatan ini PNS dikabupaten barru sangat memberi perhatian terhadap aplikasi e-PUPNS yang dikeluarkan oleh BKD kap. Barru. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara bagaimana mereka berusah mencari informasi yang lebih lengkap mengenai e-PUPNS ini.

1. Merespon (Responding)

Dalam tingkatan ini PNS di sekretariat daerah kabupaten barru sangat mengetahui maksud tujuan dan fungsi aplikasi e-PUPNS, ini dilihat dari hasil wawancara yang rata-rata informan sangat mengerti dan paham aplikasi ini.

1. Menghargai (Valuing)

Tingkatan ini, PNS di kabupaten barru mengadakan interaksi dengan pihak terkait dalam hal ini BKD kabupaten barru maupun Siantar sesama PNS sendiri tentang masalah-masalah yang terkait e-PUPNS.

1. Bertanggung jawab (responsible)

Pada tingkatan ini, dari data penelitian yang didapatkan maka diketahui bahwa PNS yang mengerjakan sendiri atau mendelegasikan penginputan data mereka bertanggung jawab penuh terhadap sikap yang mereka ambil.

### Sosialisasi untuk melatih kemampuan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan data bahwa BKD kabupaten barru dalam memperkenalkan e-PUPNS selain menggunakan sosialisasi yang sifatnya menginformasikan ternyata BKD kabupaten barru juga membuat sebuah sosialisasi dalam bentuk pelatihan teknis, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu tentang bagaimana menggunakan aplikasi e-PUPNS, BKD mengirimkan surat permintaan kepada masing-masing SKPD untuk mengirimkan 1 (satu) orang perwakilan untuk kemudian dilatih dan di jadikan USER verifikator tingkat satu (level 1).

verifikator inilah yang nantinya akan mengajarkan kembali pegawai negeri sipil yang ada di SKPD masing-masing tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi e-PUPNS ini. dalam pelatihan yang dilakukan oleh BKD kabupaten barru, para peserta di berikan CD tutorial penggunaan aplikasi,dan dilatih selama beberapa jam. Namun dalam pelaksanaannya ternyata Verifikator menganggap sosialisasi ini kurang efektif karena hanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, serta tempat yang tidak kondusif.

Para PNS sendiri yang ada lingkup sekretariat daerah menganggap bahwa sosialisasi tersebut tidak efektif, mengingat bahwa di sekretariat daerah kabupaten barru terdiri dari beberapa Bagian, diantaranya Bagian Umum, Bagian Kesra, Bagian Humas, Bagian. Adm .Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan bagian pemerintahan umum. Dari banyaknya bagian yang ada di sekretariat hanya 1 (satu) bagian yang bisa mengirimkan utusan untuk dijadikan verifikator sedangkan bagian lain dianggap sudah terwakilkan. Hal inilah yang kemudian dianggap kurang efektif oleh sebagian pegawai negeri sipil karena tidak tersampaikannya informasi tersebut ke bagian-bagian lain. Dan perbandingan antara 1 (satu) orang verifikator dengan ratusan pegawai yang ada di sekretariat daerah.

### Sosialisasi untuk merubah sikap

Pada tahap ini BKD kabupaten barru tidak melakukan sosialisasi yang khusus dengan tujuan merubah sikap pegawai negeri sipil di sekretariat daerah kabupaten barru. Tetapi di atas telah disinggung bagaimana sosialisasi itu dapat mengubah pengetahuan, perasaaan, dan sikap seseorang.

## **Tingkat Penguasaan ICT (Information Communication Technologi) Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barru dalam pelaksanaan e-PUPNS**

Teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan saat ini menjadi hal yang sangat penting, penerapan ICT yang terintegrasi menjadi kebutuhan yang paling urgen di dalam System sebuah organisasi. ICT menjadi solusi efektif bagi organisasi pemerintah maupun swasta. Kurangnya kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana roda organisasi dijalankan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu tolak ukur sebuah organisasi bergerak ke tentunya arah perubahan.

Hal tersebut berpengaruh juga bagaimana sumber daya manusia organisasi tersebut. Kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor penting menggerakkan roda organisasi. Penggunaan inovasi-inovasi baru juga harus di imbangi dengan kemampuan sumber daya manusianya, produktivitas Organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan.

Untuk memberdayakan SDM bermutu agar tidak menjadi beban, melainkan jadi modal organisasi, diperlukan dua kriteria, yakni mereka yang mempunyai motivasi kerja tinggi dan kemampuan unggul. Kadarnya bisa berbeda-beda, tergantung skala organisasi, tantangan yang dihadapi, serta rencana strategis pengembangan SDM.

Seperti halnya dalam kasus e-PUPNS ini, sosialisasi yang dilakukan oleh BKD kabupaten barru untuk memperkenalkan e-PUPNS tentunya akan memberi dampak terhadap kemampuan pegawai negeri sipil di sekretariat daerah kabupaten barru dalam hal penggunaan ICT. Aplikasi berbasis internet ini banyak tidaknya tentu akan memberikan dampak terhadap kemampuan mereka yang tentunya didasarkan dari pengetahuan yang mereka dapat dari sosialisasi e-PUPNS ini.

Berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian bahwa Dari hasil sosialisasi yang telah dilakukan oleh BKD Kabupaten Barru, sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Nonoatmojo, 2003, maka pengetahuan PNS di sekretariat daerah kabupaten barru terkait dengan e-PUPNS dapat diukur dalam 6 tingkatan yaitu :

1. Tahu (*Know*)

Rata-Rata Pegawai Negeri Sipil di lingkup Sekretariat Darah Kabupaten Barru cepat mengetahui tentang adanya pendataan ulang pegawai negeri sipil, informasi yang di dapatkan dari beberapa sumber antara lain, melalui persuratan birokrasi, melalui Internet, Spanduk/pamflet yang di sosialisasikan oleh BKD kabupaten barru.

1. Memahami (Comprehention)

Pada tingkat ini PNS di sekretariat daerah kabupaten barru sangat memahami isi dan fungsi Form yang di sediakan di dalam aplikasi e-PUPNS yang sosialisasikan oleh BKD. Mereka juga mampu menguraikan maksud dan tujuan diadakannya program e-PUPNS ini.

1. Aplikasi (*Aplication*)

Dalam konteks ini PNS di kabupaten barru mampu menggunakan secara langsung (sebenarnya) aplikasi e-PUPNS yang telah disosialisasikan oleh BKD kabupaten barru, baik dalam Hal registrasi awal, pengisian Data, menyimpan data, serta menanggulangi kesalahan-kesalahan yang mungkin didapatkan .

1. Analisis (Analysis)

Pegawai negeri sipil yang menggunakan aplikasi e-PUPNS mampu menjabarkan bagian perbagian di dalam aplikasi e-PUPNS dan menghubungkan bagian-bagian lainnya di dalam program tersebut.

1. Sintesis (Syntesis)

Pada tahapan ini pegawai negeri sipil yang menggunakan e-PUPNS mampu merangkum dan memberikan hubungan yang logis antara pengetahuannya tentang e-PUPNS dengan pengetahuan mengenai aplikasi yang lain.

1. Evaluasi (evaluation)

Pegawai negeri sipil di sekretariat daerah kabupaten barru yang menggunakan e-PUPNS sudah mampu memberikan penilaian berdasarkan beberapa kriteria tentang kelebihan-kelebihan tentang aplikasi e-PUPNS yang digunakan dan kebanyakan dari mereka menyambut positif program tersebut.

Dari hasil analisis yang dilakukan berdasarkan 6 tingkatan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penguasaan ICT (Informatif Communication Technologi) pegawai negeri sipil di sekretariat daerah kabupaten barru sangat baik. Ini dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan hingga pada tingkat kemampuan mereka untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap informasi yang diterima.